

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUNGO DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

¹Ariyanto.M, ²Hamirul

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

Jl. Setih Setio No.5 Kel. Pasir Putih Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

hrul@ymail.com, ayanto825@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah kabupaten bungo dalam rangka mengatasi laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan informan sebanyak 10 orang serta menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran BPMPDPP & KB dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo sudah cukup baik walaupun belum mencapai target secara maksimal. Hal ini dilihat dari komitmennya melakukan pelaksanaan program KB dengan sasaran wanita usia subur yang bersuami kemudian diiringi dengan program Generasi Berencana Yang menyoal anggota masyarakat usia muda, agar dapat menunda usia perkawinan dan mempersiapkan masa depan yang berencana. Program tersebut merupakan upaya agar tercapainya tujuan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk secara optimal.

Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan, Keluarga berencana, Laju penduduk, Bungo

ABSTRACT

This article aims to determine the role of the bungo district government in order to overcome the population growth rate by using informants as many as 10 people and using descriptive methods and qualitative approaches.

Based on the results of the research and discussion on "The Strategy of the Government Community Empowerment Agency in the Hamlet of Women's Empowerment and Family Planning in the Controlling Population Growth Rate, the following conclusions can be drawn:

The role of BPMPDPP & KB in efforts to control the growth of the population in Bungo Regency is good enough even though it has not reached its maximum target. This is seen from its commitment to implementing family planning programs with the aim of women having reproductive age who are married and then accompanied by a Generational Planning program that targets young community members, in order to

delay the age of marriage and prepare for a future plan. The program is an effort to achieve goals in controlling optimal population growth.

Keywords: Women's Empowerment, Family planning, The rate of population, Bungo

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya dimaksudkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dan bidang otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan didaerahnya dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan arah pembangunan melalui visi yang ingin dicapai yaitu Bungo MAS (Mandiri, Aman dan Sejahtera) 2016.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Bungo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 telah ditetapkan BPPDPP & KB. sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus mampu merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dan kewenangan yang dimilikinya khususnya di Kabupaten Bungo dalam memberikan pelayanan publik dalam kaitan dengan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di daerah.

Proyeksi data demografi di Kabupaten Bungo tahun 2013 berdasarkan dari hasil sensus tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, jumlah penduduk Kabupaten Bungo sebanyak

329.934 orang yang terdiri dari 168.783 orang laki-laki dan 161.151 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 104,74. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 320.300 orang, maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo cukup tinggi, hal ini merupakan dampak dari kemajuan pembangunan yang sangat signifikan untuk menarik orang datang ke Kabupaten Bungo.

Pada Pasal 20 UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pasal ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnya di daerah-daerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya.

Komposisi umur merupakan faktor yang sangat penting dalam demografi, terutama dalam berbagai analisis kependudukan. Menurut komposisi umur penduduk, yang dimaksud dengan penduduk tua adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 30 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas minimal 10% dari penduduk pada suatu wilayah. Sementara, penduduk muda adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 40% dan penduduk umur 65 tahun keatas maksimal 5%.

Komposisi penduduk Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa 31,01% penduduk berusia muda (umur 0-14 tahun), 65,29 % berusia produktif (umur 15-64 tahun), dan hanya 3,40 % yang berumur 65 tahun lebih, sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan sebesar 52,70. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif.

Berdasarkan pengamatan awal penulis dilapangan, bahwa upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana BPMPDPP & KB dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo belum optimal, hal ini disebabkan oleh :

1. Kurang optimalnya program Keluarga Berencana (KB).
2. Masih tingginya angka kelahiran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana strategi BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk ?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Nawawi (2005:148), Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada akhir tahun 1970.

Tujuan program Keluarga Berencana secara makro untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kelahiran, secara mikro mewujudkan

ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan.
2. Pengaturan kelahiran.
3. Pembinaan ketahanan keluarga.
4. Peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
5. Meningkatkan koordinasi dan peran serta aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Keluarga Berencana.
6. Meningkatkan peran penyuluh dalam peningkatan capaian program.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sulit terlaksana jika jumlah penduduk semakin tidak terkendali. Indonesia telah dapat menurunkan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya , dari rata-rata 5,6 juta anak pada tahun 1970 menjadi rata-rata 2,6 juta anak pada tahun 2003. Ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,3 persen per tahun menjadi 1,4 persen. Tetapi karena jumlah penduduk di Indonesia yang besar sekitar 219 juta, penduduk Indonesia setiap tahun akan bertambah sekitar 3 juta jiwa sehingga BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) memproyeksikan pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan jauh lebih besar dari 273 juta. Ini berarti beban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota akan sangat berat dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja, dan lain-lain. Apalagi Indonesia masih menghadapi persoalan

serius dengan kemiskinan sebanyak 18,2 persen atau sekitar 38,4 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan indeks mutu hidup manusia Indonesia masih pada peringkat 117 dari 175 negara.

Menurut Rusli (1999:23) Faktor-faktor yang juga menunjang tingginya angka natalitas dalam suatu negara:

1. Kebijakan Pemerintah, kebijakan pemerintah mempengaruhi apakah ada pembatasan kelahiran atau penambahan jumlah kelahiran. Selain itu kondisi pemerintah yang tidak stabil misalnya kondisi perang akan mengurangi angka kelahiran.
2. Adat istiadat di masyarakat, kebiasaan dan cara pandang masyarakat mempengaruhi jumlah penduduk. Misalnya nilai anak, ada yang menginginkan anak sebanyak-banyaknya, ada yang menilai anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan atau sebaliknya, sehingga mengejar untuk mendapatkan anak laki-laki atau sebaliknya.
3. Kematian dan kesehatan, kematian dan kesehatan berkaitan dengan jumlah kelahiran bayi. Kesehatan yang baik memungkinkan bayi lebih banyak yang hidup dan kematian bayi yang rendah akan menambah pula jumlah kelahiran.
4. Struktur Penduduk, penduduk yang sebagian besar terdiri dari usia subur, jumlah kelahiran lebih tinggi dibandingkan yang mayoritas usia non produktif. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung besarnya angka kematian caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor

pendukung kematian dan faktor penghambat kematian.

Faktor pendukung kematian (pro mortalitas) mengakibatkan jumlah kematian semakin besar. Yang termasuk faktor ini adalah: (1) Sarana kesehatan yang kurang memadai, (2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, (3) Terjadinya berbagai bencana alam, (4) Terjadinya peperangan, (5) Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri, dan (6) Tindakan bunuh diri dan pembunuhan.²⁵

Faktor penghambat kematian (anti mortalitas) mengakibatkan tingkat kematian rendah. Yang termasuk faktor ini adalah: (1) Lingkungan hidup sehat, (2) Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap, (3) Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, (4) Tingkat kesehatan masyarakat tinggi, dan (5) Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk.²⁶

Kepadatan penduduk aritmatik yaitu jumlah rata-rata penduduk yang menempati wilayah seluas satu kilometer persegi (1 km²), dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Terus meningkatnya tingkat kepadatan penduduk berbanding terbalik dengan jumlah ketersediaan lahan. Masalah ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala dibangunnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) baru. Padahal dengan jumlah penduduk yang tinggi pada suatu wilayah, maka diperlukan penambahan luas RTH yang memadai bagi masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktanya, masyarakat banyak beraktifitas menggunakan bahan bakar dalam transportasinya, dan menghasilkan karbondioksida yang

menjadi penyebab adanya pemanasan global yang terjadi sekarang ini.

Menurut Terry bahwa Manajemen merupakan proses yang khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya.

Manajemen yang diungkapkan Terry menitik-beratkan pada usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang di dalam organisasi harus jelas wewenang, tanggung-jawab dan bebas tugasnya.

Metode Penelitian

Metode (Sugiyono, 2014:1) merupakan cara ilmiah yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu, cara pertama ini dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.

Menurut Husaini (2003:22), metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁷ Selanjutnya menurut Surahmad, metode penelitian adalah suatu tehnik atau cara mencari, memperoleh, menyimpulkan serta mencatat data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penyusunan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Informan yang dilibatkan sebanyak 10 orang dengan metode pengumpulan dengan wawancara sebagai sumber data primer dan dengan data di analisis menggunakan metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pada dasarnya dimaksudkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dan bidang otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan didaerahnya dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan arah pembangunan melalui visi yang ingin dicapai di tahun 2016 yaitu Bungo MAS (Mandiri, Aman dan Sejahtera) .

Guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Bungo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 telah ditetapkan BPMPDPP & KB. sebagai salah satu SKPD yang harus mampu merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dan

kewenangan yang dimilikinya khususnya di Kabupaten Bungo dalam memberikan pelayanan publik dalam kaitan dengan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di daerah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Proyeksi data demografi di Kabupaten Bungo tahun 2013 berdasarkan dari hasil sensus tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, jumlah penduduk Kabupaten Bungo sebanyak 329.934 orang yang terdiri dari 168.783 orang laki-laki dan 161.151 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 104,74. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 320.300 orang, maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo cukup tinggi, hal ini merupakan dampak dari kemajuan pembangunan yang sangat signifikan untuk menarik orang datang ke Kabupaten Bungo.

Pada Pasal 20 UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pasal ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnya di daerah-daerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya. Seperti

yang dinyatakan oleh Bapak Nawawi bahwa:²⁹

“...Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk maka perlu disusun strategi program keluarga berencana dengan Menetapkan prinsip-prinsip “penduduk adalah factor utama dalam pembangunan atau pembangunan manusia seutuhnya, dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dan kontrol kualitas tanpa mengedepankan kuantitas . semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan perubahan besar aspek social kemasyarakatan telah terjadi pergeseran paradigma tentang perkawinan, kelahiran dan keluarga. Aspek sosial-ekonomi bergeser dari tradisional ke modern seperti “pernikahan dini dan kelahiran awal, “” ke pendewasaan perkawinan dan penundaan kelahiran, nilai anak laki-laki dan perempuan dibuang jauh dan pertolongan persalinan diprioritaskan sebagai dasar membentuk keluarga kecil bahagia, keluarga harmonis.

Berhubungan dengan kualitas kesehatan reproduksi serta pengaturan jarak kelahiran maupun mengatur jumlah keturunan BPMPDPP & KB memberikan berbagai pelayanan kontrasepsi KB, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Ningsih sebagai petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menyebutkan bahwa:³⁰

“...dalam program KB, BPMPDPP & KB menyediakan berbagai pelayanan kontrasepsi KB seperti penggunaan kondom pada pria sebelum bersenggama. Kondom juga sangat efektif dalam penyegahan penyakit

seksual serta mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar. Penggunaan diafragma yang berfungsi menutupi serviks agar sperma tidak mencapai saluran alat reproduksi, cara kerja diafragma hampir sama dengan kondom. Selanjutnya, KB suntik baik yang dilakukan suntik satu bulan maupun yang suntik tiga bulan, ada juga penggunaan pil KB. Ada pula Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), AKDR ini ada beberapa macam yaitu, cooper-T, cooper-7, multi load dan lippes loop. Selanjutnya ada kontrasepsi implant atau kontrasepsi bawah kulit, karena penggunaannya pada bawah kulit lengan atas sebelah dalam. Selanjutnya ada kontrasepsi tubektomi (sterilisasi pada wanita) dan kontrasepsi vasektomi (sterilisasi pada pria).

Dari penjelasan diatas menunjukkan banyaknya pilihan yang dapat diajukan dan di berikan kepada calon peserta KB maupun peserta KB dalam upaya mereka mengatur kelahiran atau membatasi jumlah keturunan. Berjalannya pelayanan tersebut otomatis dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo. Hal itu merupakan tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo secara khusus dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara umum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Alfi Syamsir.

“...Untuk Pengendalian Jumlah Penduduk, Kita perlu Menjaga kualitas pelayanan, kebijakan solusi dan terpadu”, dalam rangka untuk memperdalam reformasi yang telah mencapai keberhasilan awal. Kelompok

masyarakat diberikan keleluasaan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan kegiatan KB karena urusan keluarga berencana harus transparan dan diberikan peran penuh untuk menerapkan aturan hukum dan pembelaan hak-hak hukum dan kepentingan masyarakat .karena program keluarga berencana memfasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melakukan kajian strategis dan meningkatkan sistem jaminan sosial yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. “ mengadakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat kabupaten Bungo.

Dapat disimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Petugas Lapangan BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo, bahwa Untuk Pengendalian Jumlah Penduduk, Kita perlu Menjaga kualitas pelayanan, kebijakan solusi dan terpadu”, dalam rangka untuk memperdalam reformasi yang telah mencapai keberhasilan awal. Kelompok masyarakat diberikan keleluasaan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan kegiatan KB karena urusan keluarga berencana harus transparan dan diberikan peran penuh untuk menerapkan aturan hukum dan pembelaan hak-hak hukum dan kepentingan masyarakat .karena program keluarga berencana memfasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melakukan kajian strategis dan meningkatkan sistem jaminan sosial yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana

serta mengadakan sosialisasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat kabupaten Bungo.

Selain dalam bidang KB, BPMPDPP & KB juga memiliki strategi lain yang memiliki tujuan sama dengan sasaran generasi penerus atau generasi muda. Strategi ini disebut program Generasi Berencana. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh bapak kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo bahwa :³¹

“...BPMPDPP & KB dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khusus generasi muda memiliki program Generasi Berencana (GenRe). Program ini memiliki sasaran remaja maupun pemuda dengan rentang usia 10-24 tahun, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah dan masyarakat yang peduli akan kehidupan para remaja.kegiatan GenRe meliputi tiga hal yaitu pencegahan HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan pendewasaan usia perkawinan. Dalam GenRe BPMPDPP & KB mempromosikan pendewasaan atau penundaan usia perkawinan yaitu 20 tahun keatas bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki”

Dari penjelasan di atas di atas, selain pengendalian kelahiran pada wanita atupun pria yang berada pada masa usia reproduktif yang telah menikah pemerintah juga melakukan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui generasi muda. Karena dalam generasi muda yang tergabung dalam GenRe akan memiliki jenjang pendidikan yang terencana, selanjutnya berkarir yang terencana pula sehingga mampu mencegah pernikahan

dini maupun menunda dan membatasi kelahiran.

Secara umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Namun masih saja terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian melalui cara wawancara secara langsung maupun menggunakan daftar pertanyaan yang di tujukan kepada sampel penelitian.

Menurut kepala BPMPDPP & KB Bapak Nawawi menuturkan bahwa “...ketersediaan personil tenaga penyuluh dilapangan masih kurang seharusnya satu tenaga penyuluh membawahi satu desa/dusun atau kelurahan kelurahan. Namun sementara ini belum bisa memadai”.³²

Penjelasan Bapak Nawawi ini sejalan dengan pendapat yang di sampaikan Latifah yang merupakan penduduk di dusun Bedaro yang mengungkapkan bahwa:³³

“...tenaga penyuluh di dusun ini masih kurang, karena jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah keluarga maupun luas wilayah yang di layani, sehingga informasi tidak dapat merata dan pelayanan kurang maksimal”

Dari argumentasi yang dikemukakan informan memperlihatkan bahwa pentingnya menyeimbangkan antara eksekutor kebijakan atau program dalam hal ini

tenaga penyuluh terhadap target dan wilayah target. Sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian terhadap tujuan suatu kebijakan atau program.

Berkenaan dengan anggaran kegiatan Bapak Nawawi mengatakan, “selain masalah jumlah petugas PLKB, anggaran juga menjadi hambatan karena keterbatasan dana anggaran dari daerah untuk pelaksanaan pengendalian penduduk”.³⁴

Kualitas sumber daya manusia memiliki faktor penting dalam upaya mensukseskan suatu program. Sebab manusia yang berkualitas akan mampu mendaya gunakan sumber daya yang ada secara tepat guna dan tepat sasaran serta tepat waktu.

Selain masalah sumber daya PLKB yang masih kurang, ada juga masalah yang dinilai menjadi hambatan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo seperti yang ditulis Bapak Mairiwan di pertanyaan yang di ajukan kepadanya. Bapak Mairiwan menyatakan bahwa, “tidak semua tenaga PLKB memiliki penguasaan yang baik terhadap apa saja yang menjadi peran atau tugas, karena disebabkan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang kerja tenaga penyuluh”.³⁵

Hal ini juga dikeluhkan oleh Bapak Alfi Syamsir yang menyebutkan “...tidak semua wilayah dapat kami jangkau dalam upaya penyuluhan maupun pelayanan KB, karena buruknya jalan dan jauhnya jarak menghambat mobilisasi kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.

Masih Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Tingkat pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Hal tersebut juga di akui petugas PLKB Ibu Sri Ningsih yang menyatakan “masih ada warga dusun yang tidak mengerti tentang alat-alat kontrasepsi dan menganggap tabu hal tersebut. Serta juga masih ditemui masyarakat yang menganggap KB itu tidak sesuai ajaran agama”.

Penulis juga menemukan hampir seluruh wanita usia subur yang jadi sampel tidak mengerti dan paham dengan semua bentuk pelayanan kontrasepsi KB. Umumnya mereka hanya mengenal pengguna pil KB dan suntik KB, serta sebagian yang mengerti tentang implant. Semua wanita usia subur yang menjadi sampel ketika ditanya tentang penggunaan kondom mereka menyatakan tidak menggunakan karena malu untuk membeli. Hal ini seperti yang ditunjukkan salah satu sampel yang bernama Ibu Rina yang menyatakan “ tidak menggunakan alat kontrasepsi kondom sebab malu dengan penjualnya dan malu untuk meminta kepada petugas PLKB”.

Selanjutnya dalam mengatasi kualitas sumber daya manusia petugas PLKB, BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo memiliki cara dalam mengatasi hal tersebut seperti yang di ungkapkan Bapak Mairiwan yaitu, “... untuk meningkatkan kualitas tenaga PLKB, BPMPDPP & KB mengikut sertakan petugas PLKB di kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pihak terkait , setelah itu diharapkan kualitas penyuluhan dan pelayanan KB menjadi maksimal. Disisi

lain petugas PLKB yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diharapkan member pengalaman kepada petugas yang lain”.

Sedangkan dalam mengatasi ketersediaan anggaran yang diberikan pemerintah daerah Bapak Nawawi untuk mengatasi itu dia menyatakan bahwa

“,, untuk mengatasi keterbatasan dana anggaran yang di berikan pemerintah daerah, BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo mengoptimalkan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna memaksimalkan peyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga target yang ingin tercapai bisa optimal”.

Sedangkan untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap program KB, Bapak Mairiwan selaku Kepala Bagian KB/KS meyakini

“,,BPMPDPP & KB melakukan kegiatan penyuluhan, khususnya di wilayah desa/dusun yang mayoritas penduduknya masih menganggap awam KB dengan segala macam jenisnya tersebut. Pembangunan pemahaman masyarakat dinilai sangat penting, karena dengan mengertinya masyarakat terhadap manfaat dan tujuan program KB akan menumbuhkan kesadaran yang tinggi masyarakat untuk ber-KB. Dan apa bila itu bisa terwujud,maka kerja BPMPDPP & KB bisa menjadi lebih ringan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Bungo”.

Hal sejalan juga di sampaikan Bapak Nawawi yang mengatakan “,,BPMPDPP & KB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, rutin melakukan kegiatan penyuluhan dengan menggandeng bidan atau dokter

sebagai wujud kerja sama dengan organisasi profesi lingkup kesehatan”.

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber-KB BPMPDPP & KB perlu memberikan pengenalan dan pengetahuan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Sehingga ketika timbul kesadaran dalam diri masyarakat terhadap pentingnya mengatur dan merencanakan kelahiran akan memperingan tugas BPMPDPP & KB dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran BPMPDPP & KB dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo sudah cukup baik walaupun belum mencapai target secara maksimal. Hal ini dilihat dari komitmennya melakukan pelaksanaan program KB dengan sasaran wanita usia subur yang bersuami kemudian diiringi dengan program Generasi Berencana Yang menasar anggota masyarakat usia muda,agar dapat menunda usia perkawinan dan mempersiapkan masa depan yang berencana. Program tersebut merupakan upaya agar tercapainya tujuan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, H. (2005). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Gajah Mada Pers.

Rusli, S. (1999). *Pendudukan dan Perubahan*. Yogyakarta: Pusta Pelajar.

Setiadi, H. U. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (1990). *Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Ghalia